BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sampai saat ini pembangunan gedung-gedung di Indonesia sebagian besar cenderung belum mencerminkan kenyamanan bagi semua orang, dikarenakan belum dapat digunakan oleh kelompok masyarakat yang memiliki kecacatan atau keterbatasan fisik. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip pembangunan dari UUBG pasal 16 tentang Persyaratan Keandalan Bangunan Gedung dan ketentuan bangunan gedung yang meliputi fungsi, persyaratan, penyelenggaraan dan pembinaan serta sanksi yang dilandasi oleh asas kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, dan keserasian dengan lingkungannya bagi kepentingan masyarakat.

UUBG atau Undang-Undang Bangunan Gedung mensyaratkan tahun 2010 bangunan gedung harus memenuhi kelayakan fungsi bangunan yang diantaranya memenuhi persyaratan ANDAL. Yang dimaksud dengan keandalan bangunan gedung adalah keadaan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan gedung sesuai dengan kebutuhan fungsi yang telah ditetapkan. Dari butir-butir pemenuhan syarat tersebut ada syarat mengenai aksesibilitas untuk penyandang cacat.

Kegiatan penelitian mengenai aksesibilitas penyandang cacat telah dilakukan dalam studi terdahulu, yaitu dalam mata kuliah Seminar. Penulis melakukan penelitian terhadap beberapa fasilitas kesehatan di kota Bandung. Hasil yang penulis dapatkan adalah bahwa fasilitas–fasilitas pelayanan umum di kota Bandung seperti pelayanan kesehatan bahkan belum dilengkapi dengan fasilitas yang dapat digunakan oleh pengguna yang berkebutuhan khusus seperti penyandang cacat tubuh dan pengguna lain seperti lansia, anak-anak dan ibu hamil.

Dalam hal ini penulis merasa prihatin karena di kota besar seperti Bandung ini pelayanan dan fasilitas bangunan publiknya masih sangat kurang memperhatikan

faktor kenyamanan, apalagi bagi kaum *diffable* yang memiliki kesulitan tersendiri dalam melakukan gerak dan aktivitasnya.

Berangkat dari rasa prihatin tersebut, penulis merasa perlu membantu dan ingin berfikir mulia. Sehingga penulis mengusulan model perancangan berupa Pusat Rehabilitasi Penyandang Cacat Tubuh. Dimana fasilitas rehabilitasi ini berfungsi untuk mengakomodir para penyandang cacat dalam melakukan segala aktifitasnya dan menjadikan mereka menjadi manusia yang tangguh dan mandiri, sehingga mereka dapat memiliki kemampuan dalam menjalankan aktivitasnya di lingkungan luar tanpa merasa kesulitan akibat dari kecacatannya tersebut.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Model Perancangan Fasilitas Penyandang Cacat ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang terpadu bagi penyandang cacat di kota Bandung. Perancangannya adalah menciptakan **wadah** bangunan yang mengakomodir kebutuhan orang berkebutuhan khusus, sehingga dapat menumbuhkan kemandirian dalam menjalani kehidupan tanpa merasa kesulitan menjalani aktifitasnya sehari-hari dan tidak tergantung kepada orang lain.
Bangunan juga dapat memenuhi standar yang ditetapkan dalam UUBG, sehingga pada saat pemberlakuan sertifikat layak fungsi bangunan, fasilitas ini dapat memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

1.3 PERMASALAHAN

A. Problem fisik

- Mobilitas; karena keterbatasan fisik, maka akan mengakibatkan gangguan kemampuan motorik gerak untuk melakukan suatu perbuatan atau gerakan-gerakan tertentu yang berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari.
- Kecepatan; kecepatan bergerak dipengaruhi oleh faktor pengenalan terhadap lingkungan. Mereka akan lambat jika berada pada lingkungan yang mempunyai banyak halangan.

B. Problem Lain

1. Problem mental / psikologis

Problem kejiwaan yang dialami:

- Rendah iri atau sebaliknya,
- Mudah tersinggung,
- Kadang-kadang agresif sekali,
- Mudah curiga,
- Labil.

2. Problem sosial

Sosial; pandangan masyarakat mengenai penyandang cacat yang memiliki keterbatasan bergerak mengalami kecacatan atau keterbatasan pula pada hal-hal lain. Hal ini mengakibatkan penyandang cacat enggan untuk berinteraksi dengan masyarakat. Keadaan tersebut menyebabkan mereka tidak terlatih untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain.

3. Problem masyarakat

Masyarakat ikut mempengaruhi keberhasilan dalam penanganan dan penanggulangan permasalahan penyandang cacat, karena pada hakekatnya permasalahan mereka adalah keberadaannya di tengah masyarakat.

Hal ini tercermin dari:

- Sikap ragu-ragu terhadap kemampuan penyandang cacat,
- Sikap masa bodoh terhadap permasalahan mereka,
- Belum meluasnya partisipasi masyarakat dalam menangani permasalahan penyandang cacat,

Masalah perancangan:

- Memfasilitasi kebutuhan orang berkebutuhan khusus, dalam hal ini penyandang cacat tubuh (Tuna Daksa) baik dalam hal kemudahan, gerak dan sirkulasi.

- Menciptakan kebutuhan yang dapat mengakomodir semua masalah rehabilitasi fisik maupun rehabilitasi mental.

1.4 METODOLOGI

1. Studi literatur

a. Studi literatur untuk mempelajari ruang gerak penyandang cacat tubuh.

b. Studi literatur untuk mempelajari dimensi bangunan rehabilitasi medis beserta fasilitas pendukungnya

2. Pengamatan lapangan

Mengamati perilaku dan ruang gerak penyandang cacat tubuh dalam melakukan aktifitasnya pada bangunan publik.

3. Studi banding

a. Studi banding dengan cara pustaka dan melalui internet yaitu mempelajari penyelesaian desain bangunan rehabilitasi dan melakukan pengamatan kebutuhan dan aktifitas pada bangunan-bangunan kesehatan yang ada di Bandung dan luar negeri.

b. Studi banding ke fasilitas rehabilitasi dan bangunan sejenis yang sudah berdiri untuk mendapat pengetahuan tentang perilaku pengguna, dan fasilitas yang tersedia.

c. Membuat suatu perbandingan akan kebutuhan dan aktivitas yang didapat melalui hasil pengamatan yang sudah ada dan kebutuhan dan aktivitas yang akan diwadahi di dalam perancangan ini.

4. Wawancara

a. Terstruktur; wawancara yang dilakukan kepada badan oengelola bangunan guna memperoleh data mengenai kebutuhan ruang dan fasilitas yang dibutuhkan.

b. Tidak terstruktur; wawancara yang dilakukan secara lisan kepada pengguna atau penyandang cacat tubuh mengenai faktor-faktor atau tingkat kesulitan yang dihadapi saat melakukan aktivitas di lingkungannya.

1.5 SKEMA BERPIKIR

1.6 LINGKUP DAN BATASAN PERANCANGAN

Lingkup perancangan meliputi perancangan bangunan pusat rehabilitasi beserta ruang-ruang luarnya dengan sasaran pasien dibatasi pada pasien rehabilitasi dengan kesulitan pada kemampuan gerak tubuh. Perancangan meliputi bangunan dan fasilitas penunjang berdasarkan studi yang telah ditentukan. Kriteria program ruang didapat dari studi literatur untuk standar, dan studi banding serta studi lapangan untuk pengamatan perilaku dan kebutuhan ruang pengguna.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan

Pendahuluan merupakan uraian mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, masalah perancangan, pendekatan, lingkup perancangan, kerangka berfikir dan sistematika pembahasan laporan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisi tentang tinjauan pustaka, studi literatur dan studi banding kasus sejenis dan kesimpulan studi banding.

Bab III Deskripsi Proyek

Deskripsi proyek menguraikan kondisi proyek secara umum, meliputi peraturan-peraturan bangunan, keadaan lahan dan kondisi disekitar lahan. Disamping itu juga dijelaskan mengenai sasaran pengguna, program kegiatan, kebutuhan ruang dan persyaratan teknis bangunan.

Bab IV Elaborasi Tema

Elaborasi tema menerangkan tentang interprestasi tema, studi banding tema sejenis, dan kesimpulan studi banding tema.

Bab V Analisis Tapak

Analisis berisi analisis mengenai lokasi dan kondisi lingkungan, analisis hubungan fungsional, analisis program ruang.

Bab VI Konsep Perancangan

Konsep perancangan berisi uraian tentang konsep dasar, konsep dari konteks lingkungan, konsep perancangan bangunan, konsep struktur, konsep tampak, konsep utilitas dan konsep hunian.

1.8 LANDASAN TEORI

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

Pasal 2 tentang Asas, Tujuan dan Lingkup

- **Asas kemanfaatan** dipergunakan sebagai landasan agar bangunan gedung dapat diwujudkan dan diselenggarakan sesuai fungsi yang ditetapkan, serta sebagai wadah kegiatan manusia yang memenuhi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan, termasuk aspek kepatutan dan kepantasan.
- **Asas keselamatan** dipergunakan sebagai landasan agar bangunan gedung memenuhi persyaratan bangunan gedung, yaitu persyaratan keandalan teknis untuk menjamin keselamatan pemilik dan pengguna bangunan gedung, serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya, di samping persyaratan yang bersifat administratif.
- **Asas keseimbangan** dipergunakan sebagai landasan agar keberadaan bangunan gedung berkelanjutan tidak mengganggu keseimbangan ekosistem dan lingkungan di sekitar bangunan gedung.
- **Asas keserasian** dipergunakan sebagai landasan agar penyelenggaraan bangunan gedung dapat mewujudkan keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungan di sekitarnya.

Pasal 16 Ayat (1) tentang ANDAL

Yang dimaksud dengan keandalan bangunan gedung adalah keadaan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan gedung sesuai dengan kebutuhan fungsi yang telah ditetapkan.